

BAB II

PEMERINTAHAN ERA ISLAM KARIMOV

Pada Bab ini akan dijelaskan terlebih dahulu tentang Islam Karimov kemudian memberikan gambaran tentang masyarakat seperti apa yang ingin dibentuk pasca perginya Uni Soviet setelah Islam Karimov menjabat.

A. Islam Karimov dan Uzbekistan

Islam Abduganievich Karimov atau Islam Karimov lahir pada tanggal 30 Januari 1938, tepatnya di kota Samarkand kuno yang bersejarah, kala itu merupakan di bagian tenggara Republik Sosialis Soviet Uzbek (Uni Soviet) .¹Terlahir dalam keluarga pegawai negeri, memberikan kesempatan bagi Karimov untuk mengejar pendidikan tinggi sambil menekankan pentingnya pelayanan publik. Islam Karimov menyelesaikan studi akademisnya di Institut Politeknik Asia Tengah dan Institut Ekonomi Nasional Tashkent, kemudian mendapatkan gelar sarjana sebagai insinyur mekanik dan ekonom. Kini Karimov memegang gelar doktor di bidang ekonomi dan telah menerbitkan beberapa artikel ilmiah.

Pada tahun 1960 Karimov memulai karir kerjanya sebagai asisten mandor dan kemudian menjadi mandor teknolog di Pabrik Mesin Pertanian Tashkent (Tashselmash). Kemudian dari tahun 1961 sampai 1966, dia bekerja sebagai insinyur desain terkemuka di Chmarkov Tashkent Aviation Production Plant, sebuah pabrik besar yang menghasilkan pesawat kargo di bekas Uni Soviet. Pada tahun 1966 Karimov

¹Trickey, Erick. Islam Karimov Biography. Diakses dari <http://www.notablebiographies.com/newsmakers2/2006-Ei-La/Karimov-Islam.html> pada 23 Mei 2017.

dipindahkan ke Kantor Perencanaan Negara Bagian UzSSR, di mana dia bekerja lebih dari 15 tahun sebagai spesialis ilmiah yang tergolong senior dan kemudian menjabat sebagai wakil ketua pertama kantor tersebut. Pada tahun 1983 dia diangkat sebagai menteri keuangan Uni Soviet, dan pada tahun 1986 dia menjadi wakil ketua Dewan Menteri dan wakil kepala pemerintahan USSR serta ketua Kantor Perencanaan Negara.

Melalui birokrasi pemerintah republik Soviet, karir Karimov meningkat dengan cepat di jajaran Partai Komunis USSR. Pada tahun 1986 dia ditunjuk sebagai sekretaris pertama Partai Komunis dari Kashka Darya oblast, sebuah wilayah di Uzbekistan selatan yang berbatasan dengan Afghanistan. Pada bulan Juni 1989 ia menjadi sekretaris pertama komite pusat Partai Komunis UzSSR, dan pada tanggal 24 Maret 1990, Karimov dipilih untuk menduduki posisi paling tinggi Soviet dari Uzbek sebagai presidennya.

Dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990 Karimov menjadi kepala Partai Rakyat Demokratik Uzbekistan (nama terbaru untuk Partai Komunis bekas Uni Soviet). Pada tanggal 31 Agustus 1991, Islam Karimov mengumumkan kemerdekaan Republik Uzbekistan,² dan meminta diadakan pemilihan nasional untuk mengisi kursi di Majelis Oliy (Majelis Tinggi, parlemen unik Uzbekistan yang menggantikan Uni Soviet) dan memilih presiden pertama untuk Uzbekistan. Dalam pemilihan presiden pertama untuk Uzbekistan, Karimov terpilih untuk masa jabatan lima tahun sebagai presiden pada tanggal 29 Desember 1991 (empat hari setelah pembubaran resmi Uni Soviet), dengan hasil lebih dari 86% Suara. Pada tanggal 8 Desember 1992, Oliy Majelis mengadopsi model konstitusi baru setelah pemerintahan liberal-demokratik lainnya. Pada tanggal 26

²Gleason, Glegory. 1997. *The Central Asian States: Discovering Independence*. Colorado : Westview Press.

Maret 1995, sesuai dengan plebisit nasional, periode jabatan Karimov diperpanjang sampai tahun 2000. Pada tanggal 9 Januari 2000, dengan hanya satu kandidat oposisi, Karimov terpilih kembali untuk masa jabatan lain, yang akan berakhir pada tahun 2005. Namun, pada tanggal 27 Januari 2002, di plebisit lain, pemilih Uzbek memperpanjang masa jabatan presiden dari lima sampai tujuh tahun, dengan Karimov diproyeksikan akan meninggalkan jabatan pada tahun 2007.

Dipengaruhi oleh kedua realitas Uzbekistan pasca Uni Soviet dan dunia pasca-Soviet runtuh, Karimov mengemukakan argumen untuk melegitimasi ingatannya terhadap kekuasaan saat membimbing transformasi Uzbekistan dalam sosialnya. Karimov banyak menulis mengenai kebutuhan untuk mengembangkan negara demokratis, ekonomi pasar bebas dan masyarakat sipil yang harus mendukung nilai-nilai politik masyarakat liberal. Karimov berpendapat bahwa 'nilai-nilai kemanusiaan, norma demokrasi sejati, kebebasan dan hak asasi manusia yang diakui secara universal dengan cepat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh delegitimasi ideologi Soviet.'³ Dan Karimov menunjukkan bahwa 'Prinsip dan institusi demokrasi 'sudah semakin meningkat pengaruhnya terhadap tingkah laku berbagai aspek kehidupan sosial di Uzbekistan.'⁴ Karimov menolak taat terhadap satu ideologi saja, malah ia menganjurkan pentingnya dan menghormati keragaman ideologis berdasarkan 'prinsip moralitas dan humanisme'.⁵

Karimov hanya membuang sebagian hal-hal yang dipelihara selama era Soviet untuk mencari penyelesaian akhir atas masalah yang ditimbulkan oleh dua cabang antara

³Karimov, Islam. 1992. *Uzbekistan : The Road of Independence and Progress*. Tashkent : Uzbekiston. Hal 4.

⁴ Karimov, Islam. *Uzbekistan on the Threshold of the Twenty-First Century*. Cambridge, : Uzbekiston. Hal108.

⁵Soviet Era Uzbek Elites Erase Rusia From National Identity. Diakses dari <http://www.eurasianet.org/departments/culture/articles/eav042002.shtml> pada 22 Mei 2017.

kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Keadaan Uzbekistan pasca kemerdekaan memaksanya untuk mengembangkan model pembangunan politik, ekonomi dan sosial untuk Uzbekistan berdasarkan pada nilai-nilai politik masyarakat liberal, sambil mempertahankan nilai-nilai bagus dari absolutisme Soviet. Misalnya, dia menyadari bahwa kapitalisme yang berorientasi pada keuntungan maksimal pribadi, sementara Marxisme berfokus pada keadilan sosial.⁶ Menurut Karimov, 'konsep ortodoks tentang "kapitalis" dan "sosialis" telah benar-benar digabungkan. Divisi buatan difungsikan sebagai penghambat kemajuan sosial suatu negara di jalan menuju pengembangan dan integrasi yang independen ke dalam masyarakat dunia.

Namun penggabungan antara nilai-nilai kepentingan pribadi yang ditemukan di kapitalisme dan kebaikan bagi publik yang ditemukan dalam sosialisme hanya bisa ada bersamaan saat keduanya bersinggungan satu sama lain. Hal ini menjadi tantangan bagi Karimov yang ingin secara damai menerapkan pengenalan ketegangan antara nilai-nilai yang terkait dengan kepentingan pribadi dan nilai-nilai yang terkait dengan kebaikan bersama yang dibutuhkan oleh masyarakat sipil. Menurut kantor pers resminya, Presiden Karimov sedang dalam perjalanan menuju kesuksesan. Kantor tersebut bahkan memuji Karimov sebagai 'pemrakarsa dan pemimpin transformasi bersejarah di negara Uzbekistan', yang telah berkontribusi dalam pengembangan model pembangunan ekonomi yang didasarkan pada lima prinsip berikut: 'perubahan ideologisasi ekonomi, supremasi undang-undang, reformasi selangkah demi selangkah, peraturan negara selama masa transisi dan kebijakan sosial yang kuat'. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ekonomi pasar dan komitmen terhadap peraturan undang-undang diperlukan bagi

⁶Karimov, Islam. 1993. *Building the Future: Uzbekistan—Its Own Model for Transition to a Market Economy*. Tashkent: Uzbekiston. Hal : 18.

masyarakat sipil agar terciptanya kondisi yang dinamis. Meskipun begitu, karakter dan kualitas masyarakat sipil itu sendiri juga akan berpengaruh untuk mendapatkan kondisi yang diinginkan. Ada dua prinsip penting pemikiran politik Karimov yaitu perubahan ideologisasi ekonomi dan supremasi undang-undang yang akan menjadi panduan untuk memahami tipe masyarakat Uzbek serta membayangkan bagaimana peran penting agama di masyarakat dan implikasi dari peran kebebasan beragama itu sendiri.

B. Reformasi Ideologisasi Ekonomi

Karimov berpendapat keputusan kebijakan politik dan ekonomi yang dibuat selama era Soviet berkuasa adalah bencana bagi Uzbekistan. Politisasi ekonomi dan masyarakat yang dilakukan oleh Uni Soviet pada dasarnya berusaha menangani banyak masalah, seperti masalah produksi pangan, pengembangan sumber daya energi, dan degradasi ekologi. Namun, upaya ini justru merusak ekonomi dan sosial yang ada di Uzbekistan. Menurut Karimov, keputusan yang telah dilakukan oleh Uni Soviet membawa ketidakseimbangan ekonomi, seperti penurunan sumber daya material dan keuangan, serta meningkatnya hutang luar negeri.

Di lain sisi para pemimpin Soviet benar, bagaimanapun sistem dan struktur suatu negara bergantung secara langsung pada struktur ekonomi masyarakatnya. Dalam hal ini Karimov mempercayai basis ekonomi yang kuat adalah kondisi penting bagi demokrasi untuk eksis dan berkembang di dalam negara dan masyarakat. Untuk menyokong ketergantungan pada dinamika pasar demi memenuhi produktivitas yang lebih besar, Karimov berpendapat bahwa reformasi ekonomi harus dipandu oleh pengaruh ekonomi pasar yang ada di seluruh dunia: 'Pengalaman historis telah mengajarkan bahwa, terlepas dari semua perbedaan dalam kondisi ekonomi dan standar kehidupan masyarakat di

berbagai negara, mekanisme pasar dirasa paling sesuai dan terbukti paling efisien. Di bawah tahap perkembangan masyarakat dunia saat ini'. Akibatnya, Karimov mendorong Uzbekistan untuk bergerak ke arah ekonomi pasar dengan memprivatisasi banyak perusahaan milik negara dan perusahaan yang beroperasi, sementara pada saat yang sama memberikan insentif dan bantuan kepada calon investor asing untuk masuk ke dalam usaha patungan yang dijalankan pemerintah Uzbekistan.

Transisi ke ekonomi menjadi pasar memang akan sulit. Keruntuhan dan pembongkaran ekonomi komando Uni Soviet terjadi pada saat tidak ada infrastruktur pasar yang secara signifikan yang siap menggantikannya.⁷ Bagaimanapun, Karimov menghindari pendekatan laissez-faire terhadap pembangunan ekonomi, dengan alasan bahwa pasar bebas merupakan sarana terakhir, sarana yang berkontribusi terhadap pembentukan nilai-nilai baru di masyarakat Uzbekistan 'Membangun ekonomi pasar bukanlah tujuan itu sendiri. Tujuan akhir dari semua reformasi, apakah itu ekonomi, demokratis atau politis, adalah penciptaan kondisi kehidupan yang layak untuk manusia di mana dia dapat membuka dan memberikan potensi kerja, kreatif dan spiritualnya. Disini Negara memiliki peran untuk mengatur pergeseran dari ekonomi komando untuk terlibat dalam kebijakan reformasi ekonomi dengan cara bertahap demi tahap yang dilakukan dengan hati-hati, agar tercapainya tujuan ekonomi pasar bebas.

Pada kenyataannya, karena negara berperan mengarahkan transisi ekonomi dari komando ke ekonomi pasar bebas, Karimov percaya bahwa negara dengan sendirinya harus berperan aktif untuk mengendalikan dan mendikte produksi dan distribusi yang bergantung pada Mekanisme pasar. Di samping itu Uzbekistan saat periode transisi dari

⁷R. Ubaydullaeva, Gulyamov dan Akhmedov. 2000. *Independent Uzbekistan*. Uzbekistan: Mekhnat.

kepemilikan negara ke perusahaan swasta atau pribadi, negara juga harus menjamin perlindungan sosial masyarakat. Kehadiran negara dalam ekonomi akan terus dirasakan karena mengatur aktivitas pasar untuk meminimalkan dislokasi sosial dan memberikan bantuan kesejahteraan sosial. Menurut Karimov, 'Kita memerlukan model utama kita sendiri untuk membangun ekonomi pasar bebas yang berorientasi sosial, dengan mempertimbangkan kekhasan republik dan selaras dengan masa lalu, Perkembangan sekarang dan masa depan Uzbekistan.' Dengan cara ini, Karimov mengemukakan bahwa, karena negara itu sendiri demokratis, nilai universal demokrasi juga akan hadir di seluruh ekonomi: 'Ekonomi pasar yang berorientasi sosial digabungkan sepenuhnya bersama pasar bebas untuk mencapai efisiensi kemajuan ekonomi dengan jaminan sosial dan keadilan'. Dengan demikian, usulan ini akan saling mempengaruhi antara negara dan ekonomi yang ditunjukkan bahwa Uzbekistan lebih cenderung menjadi masyarakat yang layak daripada masyarakat liberal.

Pengakuan yang melekat antara hubungan kegiatan ekonomi dan nilai sosial lainnya ini mempengaruhi pemahaman Karimov tentang sifat masyarakat sipil: 'Jalan yang dipilih untuk Uzbekistan ditujukan untuk pembentukan ekonomi pasar yang berorientasi sosial yang sesuai dengan pemenuhan kepentingan republik ' Akibatnya, ekonomi pasar berorientasi sosial. Karimov bergantung pada mekanisme pasar untuk produksi dan distribusi yang lebih besar, karena ini adalah cara terbaik untuk merespons dengan cepat perubahan kondisi ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun, hal itu juga bergantung pada Mekanisme pemerintahan yang hierarkis yang berperan sebagai 'penjamin stabilitas, keamanan dan keadilan sosial'.

C. Supremasi Hukum

Saat di bawah absolutisme Soviet, negara Uzbekistan tidak boleh mendikte berbagai aspek pengambilan keputusan ekonomi, Karimov mengakui bahwa 'tidak ada dimanapun pasar murni mengatur dengan sendirinya' dan bahwa negara bertanggung jawab dalam mengendalikan masyarakat dan membimbing pasar. Negara harus berperan aktif dalam mengurangi arus dan siklus ekonomi melalui kontrol harga, memanfaatkan pajak dan kredit, subsidi dan teknik intervensionis lainnya. Kendati demikian, Karimov juga mengakui bahwa tindakan yang dilakukan oleh harus diinformasikan melalui supremasi hukum: Supremasi hukum adalah prinsip dasar negara yang diatur undang-undang. Ini mengandaikan terbentuknya predikat hukum yang mutlak di semua bidang kehidupan. Semua orang sama di hadapan hukum.

Serupa dengan nilai institusional politik masyarakat liberal, Karimov berpendapat bahwa Uzbekistan harus membangun 'negara sekuler demokratis modern' dengan bergerak menuju sistem multi partai yang mencakup persaingan dalam pemilihan terbuka dan membuka jabatan untuk publik. Dia berpendapat bahwa sebuah pemerintahan yang menggabungkan pemisahan kekuasaan di antara tiga cabang dan dipandu serta di responsif oleh prinsip-prinsip demokrasi: 'Kami memiliki setiap alasan untuk menyatakan bahwa Konstitusi Republik Uzbekistan memenuhi norma dan persyaratan paling demokratis yang ditetapkan di masyarakat dunia'. Memang, Karimov berpendapat, 'prinsip demokrasi universal' sekarang diabadikan dalam konstitusi baru, yang dirancang untuk membantu negara tersebut dalam mengembangkan masyarakat sipil yang dipandu oleh dan dilindungi oleh prinsip-prinsip ini. Untuk tujuan ini, Karimov tidak hanya menyerukan pemilihan rakyat yang populer untuk Perwakilan ke

Oliy Majlis, tapi dia telah mendorong kelanjutan pemerintahan mandiri lokal melalui Komite lingkungan kedelapan atau mahallas.

Karimov menyerukan partisipasi demokratis warga Uzbek dalam pemerintahan negara: 'Sangat penting bahwa partai politik dan gerakan dan organisasi lainnya menjalankan fungsi lembaga demokratis yang menghubungkan warga negara dan negara'. Tetapi untuk melakukan Ini, 'nilai-nilai demokrasi di seluruh masyarakat' harus diperkuat, termasuk promosi partisipasi dalam organisasi non-pemerintah. Maksud dari partisipasi masyarakat dalam berbagai organisasi yang bersifat sukarela dan profesional yang ditemukan di masyarakat sipil adalah untuk meningkatkan 'warganya' menjadi partisipasi dalam manajemen negara '. Ada hubungan kuat antara demokrasi di masyarakat sipil dan negara demokratis, menurut Karimov; Peran negara adalah untuk menghilangkan hambatan yang menghambat perpanjangan demokrasi di seluruh masyarakat sipil: 'Sebagai alat utama reformasi, negara bekerja dengan segala cara untuk meletakkan dasar bagi masyarakat sipil demokratis'.

Dalam pemikiran politik Karimov, kondisi yang diperlukan bagi masyarakat sipil sekarang tampak pada tempatnya: ekonomi pasar bebas dan kepatuhan terhadap peraturan hukum. Namun, menurut Karimov, selain melindungi kepemilikan pribadi dan menegakkan kesucian kontrak, undang-undang tersebut juga harus mencerminkan 'tradisi populer, adat istiadat dan prinsip moral yang ditanamkan ke dalam kehidupan sehari-hari penduduk dan diwarisi dari sejarah kuno mereka. Komunikasi dan keyakinan antar pribadi dan antar etnis, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, hak dan kebebasan. Karimov menyebut untuk menanamkan nilai-nilai agama, hal ini menunjukkan bahwa pemikirannya lebih condong pada pengembangan yang

layak daripada masyarakat liberal, tetapi juga harus berdasarkan tradisi dan prinsip moral yang ada di Uzbekistan

D. Kebijakan Islam Karimov Terhadap Masyarakat Sipil dan Agama

Masyarakat sipil liberal mempromosikan pentingnya kebebasan berpikir, berbicara dan berelasi, tidak hanya berkaitan dengan politik tetapi juga berkenaan dengan masalah keagamaan.⁸ Dengan pemahaman bahwa institusi formal gereja dan negara tidak mau bercampur, demokrasi liberal pada umumnya lembaga gerejawi yang terasing dengan kegiatan keagamaan mereka terhadap masyarakat sipil, bersama dengan asosiasi sukarela lainnya. Sementara nilai-nilai religius yang ditemukan di masyarakat sipil seringkali berdampak pada politik, seperti halnya nilai-nilai lain, demokrasi liberal pada umumnya bersikap toleran terhadap agama dan teologi yang beragam dan bertentangan sampai pada titik, namun tidak termasuk gangguan kekerasan yang terjadi terhadap masyarakat itu sendiri.⁹ Namun demikian, seperti banyak masalah sosial lainnya, area abu-abu menyelimuti titik toleransi tersebut, sehingga seringkali membuat sulit untuk menentukan kapan hubungan antara kepercayaan agama dan aktivitas politik menjadi tidak beradab.

Karimov bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan ini saat dia memproklamirkan perlunya kebebasan beragama dan mendorong 'kebebasan hati nurani dan agama' untuk Uzbekistan: 'Setiap individu memiliki hak untuk memegang opininya dan

⁸Reynolds, Noel B dan Durham, W. Cole. 1996. *Religious Liberty in Western Thought*. Atlanta: Scholars Press.

⁹Neuhaus, Richard John. 1984. *The Naked Public Square: Religion and Democracy in America*. Grand Rapids: William B. Eerdmans.

kepercayaannya sendiri, untuk melakukan ritual keagamaan dan ritual. Agama hari ini sebagai kekuatan spiritual memfasilitasi proses pemurnian dengan mengungkapkan kebohongan dan hipokripsi [sic] dan mempromosikan prinsip-prinsip moral yang tinggi'.⁵⁸ Namun, Karimov juga mengakui pemikiran sekuler non-religius sebagai 'sejajar dengan agama, dan memiliki hak yang sama untuk eksis' . Dia percaya bahwa interaksi antara pemikiran sekuler dan religius akan mempromosikan 'kekayaan, keragaman, dan perkembangan umat manusia'.

Menurut Karimov, negara Uzbekistan tidak hanya harus memberikan 'perlindungan sosial' selama dan setelah transisi ke ekonomi pasar, namun harus memastikan hak dan kebebasan warga terlepas dari asal etnis, kepercayaan agama, status sosial mereka, atau keyakinan politik. Dalam pembelaannya atas hak individu, Karimov meminta perhatian pada pasal spesifik dalam Konstitusi Uzbekistan yang mengakui hak demokrasi, termasuk kebebasan beragama :

1. Pasal 13. Demokrasi di Republik Uzbekistan harus bergantung pada prinsip-prinsip yang berlaku bagi semua umat manusia, yang menurutnya nilai tertinggi adalah manusia, hidupnya, kebebasan, kehormatan, martabat dan hak-hak lain yang tidak dapat dicabut. Hak dan kebebasan demokratis harus dilindungi oleh Konstitusi dan undang-undang.
2. Pasal 31. Kebebasan hati nurani dijamin untuk semua. Setiap orang berhak untuk mengaku atau tidak menganut agama apapun. Penganan wajib agama harus dilanggar .

3. Pasal 61. Organisasi dan asosiasi keagamaan harus dipisahkan dari negara dan sama di hadapan hukum. Negara tidak akan mengganggu aktivitas asosiasi keagamaan.

Karimov juga percaya bahwa negara memiliki minat khusus terhadap agama di luar yang biasanya ditemukan di masyarakat liberal. Dia berpendapat bahwa agama mengandung norma-norma perilaku universal yang ditransmisikan dari generasi ke generasi; Agama adalah dimensi spiritual masyarakat yang mempengaruhi perkembangan budaya. Dia menilai agama berperan penting, terutama Islam, bermain dalam membantu individu untuk 'mengatasi pencobaan keberadaan manusia serta keterasingan dan keterasingan mereka satu sama lain'.

Perhatian Karimov terhadap agama tidak salah tempat. Gagasan masyarakat sipil yang minimal membutuhkan seperangkat nilai bersama, bahkan sebagai dasar keragaman dan toleransi. Dengan runtuhnya Uni Soviet, usaha untuk menciptakan nilai bersama berdasarkan Marxisme-Leninisme secara formal lenyap, membiarkan ruang hampa untuk diisi oleh ideologi atau filsafat publik lainnya. Di Uzbekistan, satu-satunya kerangka filosofis yang ada yang memerintahkan seruan luas untuk memilih filsafat publik adalah Islam. Sementara sekitar 80% warga Uzbek hanya berpenduduk Muslim (Sunni), milenium terakhir perkembangan teologis Islam telah menghasilkan banyak aliran pemikiran religius di Uzbekistan. Perbedaan utama tampaknya tidak ada kaitannya dengan doktrin teologis dibandingkan dengan etika sosial. Artinya, ajaran Islam telah dengan gigih berfokus pada kebutuhan moral individu untuk berkontribusi pada kesejahteraan orang miskin dan negara untuk memperbaiki ketidakadilan sosial; Namun, ada beragam pendapat tentang bagaimana memenuhi imperatif ini secara

memadai.

Mengingat bahwa akar budaya Islam cukup dalam dan kewajiban etis Islam secara inheren bersifat politis, banyak pengamat berpendapat bahwa kehadiran Islam di Uzbekistan sangat penting untuk mengembangkan identitas nasional seperti yang dipersyaratkan oleh masyarakat sipil. Karimov juga mengakui situasi ini. Dalam perlawanan mereka terhadap ideologi Soviet, berbagai pemimpin politik dan agama Uzbek sering menarik nilai-nilai moral dari tradisi mulia yang terdapat dalam literatur sejarah mereka. Dalam upayanya untuk membuat sebuah kasus untuk mendukung penguasa etis yang adil, Presiden Uzbekistan Karimov juga sering mengajukan banding ke masa lalu, sering merujuk dan mengutip Abu Nasr al-Farabi, filsuf Muslim abad ke-10 dan pendiri politik filsafat muslim. Namun, dalam menuntun transisi negaranya dari absolutisme Soviet, Karimov menjadikan islam untuk membimbing politik dan membuat kebijakan Uzbek (serupa dengan Rawls 'Kazanistan) yang lebih jauh ditunjukkan bahwa Uzbekistan berniat menjadi sebagai masyarakat yang layak.